

Optimalisasi Pendampingan Masyarakat Terdampak Bencana di Aceh Melalui Kolaborasi Relawan, Edukasi Kesiapsiagaan, dan Penguatan Modal Sosial Komunitas

Ainal Mardhiah¹, Nurjannah², Fithriyah³, Alif Aulia Syahfitra⁴, Yuniadi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email Author: ainal.abdurrahman@ar.raniry.ac.id^{1*}, nurjannah.ismail@ar-raniry.ac.id²,
fithriyah@ar-raniry.ac.id³, 230701063@student.ar-raniry.ac.id⁴, adiyuniadi90@gmail.com⁵

Abstrak

Kata Kunci:
Pendampingan
Masyarakat, Bencana,
Relawan, Kesiapsiagaan,
Modal Sosial.

Pendampingan masyarakat terdampak bencana di Aceh menghadapi tantangan berupa kompleksitas kebutuhan penyintas, keterbatasan koordinasi ant relawan dan lembaga, belum meratanya edukasi kesiapsiagaan, serta perlunya penguatan solidaritas sosial dalam proses pemulihan. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi pendampingan masyarakat melalui kolaborasi relawan, pendidikan kesiapsiagaan, dan penguatan modal sosial komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat dengan desain partisipatif yang mengintegrasikan pemetaan kebutuhan, koordinasi pemangku kepentingan, edukasi kebencanaan, dan penguatan kapasitas lokal. Hasil analisis disusun ke dalam empat tema utama. Pertama, penguatan koordinasi relawan melalui pembagian peran, komunikasi terpadu, dan pemetaan kebutuhan penyintas. Kedua, peningkatan edukasi kesiapsiagaan melalui pembelajaran partisipatif, simulasi evakuasi, pengenalan risiko, dan penyusunan rencana tanggap darurat keluarga. Ketiga, penguatan modal sosial melalui kepercayaan, gotong royong, jejaring komunitas, dan pelibatan tokoh lokal. Keempat, pengembangan model pendampingan berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi partisipatif, dan integrasi program pemulihan dengan kelembagaan masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh bantuan material, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, kapasitas menghadapi risiko, dan kekuatan hubungan sosial. Implementasinya diarahkan pada pembentukan mekanisme pendampingan berbasis komunitas yang inklusif, adaptif, terukur, dan berkelanjutan sesuai karakteristik risiko serta kebutuhan masyarakat Aceh.

Abstract

Key Word:
Community Support,
Disasters, Volunteers,
Preparedness, Social
Capital.

Providing support to disaster-affected communities in Aceh presents several challenges, including the complex needs of survivors, limited coordination among volunteers and organizations, uneven access to preparedness education, and the need to strengthen social solidarity during the recovery process. This article analyzes strategies for optimizing community support through volunteer collaboration, preparedness education, and the strengthening of community social capital. The study employs a community-engagement approach with a participatory design that integrates needs assessment, stakeholder coordination, disaster education, and the enhancement of local capacity. The findings are organized into four key themes. First, strengthening volunteer coordination through the division of roles, integrated communication, and the mapping of survivor needs. Second, enhancing preparedness education through participatory learning, evacuation simulations, risk awareness, and the development of family emergency response plans. Third, bolstering social capital by fostering trust, mutual cooperation (*gotong royong*), community networks, and the involvement of local leaders. Fourth, developing a sustainable support model through monitoring, participatory evaluation, and the integration of recovery programs with existing community institutions. This article asserts that the success of such support is determined not only by material aid but also by the quality of coordination, the capacity to manage risks, and the strength of social ties. Its implementation focuses on establishing a community-based support mechanism that is inclusive, adaptive, measurable, and sustainable—tailored to the specific risk profiles and needs of the people in Aceh.

Copyright © 2026 Ainal Mardhiah

This work is licensed under a [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geologis, geografis, hidrometeorologis, dan karakteristik sosial masyarakatnya. Ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem menuntut penguatan sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada respons darurat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat sebelum bencana terjadi. Dalam konteks tersebut, pendampingan masyarakat menjadi instrumen penting untuk menghubungkan bantuan kemanusiaan, peningkatan pengetahuan, penguatan kelembagaan lokal, dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi. Pendampingan

yang efektif perlu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengurangan risiko, bukan semata-mata penerima bantuan dari pemerintah atau organisasi kemanusiaan. Perspektif ini relevan bagi Aceh, yang memiliki pengalaman historis menghadapi tsunami dan tetap menghadapi ancaman bencana di berbagai wilayahnya (Hidayati et al., 2025).

Pengalaman tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 memperlihatkan besarnya konsekuensi bencana terhadap kehidupan manusia, permukiman, infrastruktur, perekonomian, dan struktur sosial masyarakat Aceh. Pengalaman tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pembelajaran kebencanaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Meskipun kesadaran terhadap risiko tsunami telah berkembang, pengetahuan mengenai bahaya belum tentu secara otomatis menghasilkan kesiapan melakukan evakuasi. Kesiapsiagaan memerlukan keterampilan praktis, pemahaman jalur penyelamatan, kemampuan menafsirkan peringatan, serta kebiasaan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Penelitian di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya menunjukkan bahwa kesiapan evakuasi masyarakat masih perlu dievaluasi meskipun pengalaman bencana telah membentuk kesadaran risiko selama bertahun-tahun (*Are we prepared for the next one?*, 2025).

Tantangan pendampingan masyarakat terdampak bencana juga berkaitan dengan keragaman kebutuhan penyintas. Kebutuhan keluarga yang kehilangan tempat tinggal berbeda dari kebutuhan masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan, mengalami gangguan kesehatan, atau menghadapi keterpisahan anggota keluarga. Kelompok anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses bantuan maupun informasi keselamatan. Oleh sebab itu, pendampingan harus menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan yang mengutamakan keselamatan, martabat, partisipasi, dan akses yang adil. Penilaian kebutuhan perlu dilakukan secara partisipatif agar prioritas program tidak hanya ditentukan oleh persepsi petugas, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan perlu diukur melalui kesesuaian bantuan dengan kebutuhan nyata, keterjangkauan layanan, dan kemampuan penyintas untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan.

Kolaborasi relawan merupakan komponen penting dalam sistem pendampingan karena relawan dapat menjembatani hubungan antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemanusiaan, fasilitas kesehatan, dan pelaku usaha. Namun, keberadaan banyak relawan tidak selalu menjamin kualitas respons yang optimal. Tanpa pembagian tugas, mekanisme komunikasi, pendataan penerima bantuan, dan prosedur keselamatan yang jelas, kegiatan kemanusiaan berisiko mengalami duplikasi, kekosongan layanan, atau distribusi bantuan yang tidak merata. Kolaborasi yang efektif membutuhkan koordinasi operasional, pertukaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kesepakatan mengenai prioritas intervensi. Dalam kondisi darurat, koordinasi tersebut harus tetap memperhatikan kewenangan lembaga penanggulangan bencana dan keselamatan petugas.

Penguatan kapasitas relawan juga perlu memperhatikan kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat. Relawan tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis dalam penyaluran bantuan, tetapi perlu memahami komunikasi empatik, perlindungan kelompok rentan, kerahasiaan informasi pribadi, dan prinsip tidak merugikan penyintas. Masyarakat terdampak bencana bukan kelompok yang kehilangan seluruh kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Mereka tetap mempunyai pengetahuan lokal, hubungan kekerabatan, pengalaman menghadapi ancaman, dan mekanisme gotong royong yang dapat mendukung pemulihan. Pendampingan yang tidak sensitif terhadap kapasitas tersebut berisiko membentuk ketergantungan pada bantuan eksternal. Sebaliknya, relawan yang memfasilitasi inisiatif lokal dapat membantu masyarakat mengidentifikasi sumber daya, menentukan prioritas, dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial budayanya.

Edukasi kesiapsiagaan merupakan dimensi berikutnya yang perlu diintegrasikan ke dalam program pendampingan. Pendidikan kebencanaan dapat mencakup pengenalan ancaman, pemahaman sistem peringatan dini, penentuan jalur evakuasi, penyusunan rencana darurat keluarga, penyimpanan dokumen penting, pertolongan pertama dasar, dan mekanisme komunikasi ketika jaringan telekomunikasi terganggu. Materi pendidikan harus disesuaikan dengan jenis ancaman dan kondisi geografis setempat. Masyarakat pesisir yang berhadapan dengan risiko tsunami memerlukan pemahaman berbeda dari komunitas di bantaran sungai yang menghadapi banjir. Edukasi juga perlu disampaikan melalui bahasa yang mudah dipahami, ilustrasi, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Penelitian mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di Muara Batu, Aceh, relevan untuk menegaskan pentingnya menilai kesiapan komunitas secara kontekstual serta memperkuat pelaksanaan mitigasi pada tingkat lokal (Utariningsih et al., 2023).

Di samping edukasi formal, pengetahuan lokal dapat menjadi sumber pembelajaran yang penting. Pengalaman generasi terdahulu, cerita mengenai kejadian bencana, pemahaman terhadap perubahan lingkungan, dan kebiasaan bermusyawarah dapat membantu masyarakat menginterpretasikan ancaman. Akan tetapi, pengetahuan lokal perlu dipadukan dengan informasi ilmiah agar tidak menimbulkan rasa aman yang keliru. Informasi mengenai peringatan dini, waktu evakuasi, dan tindakan penyelamatan harus mengacu pada panduan resmi yang berlaku. Pendampingan dapat memfasilitasi dialog antara pengetahuan lokal dan pengetahuan teknis melalui pertemuan warga, kegiatan pendidikan di sekolah, serta latihan bersama.

Selain kolaborasi dan pendidikan, modal sosial merupakan fondasi yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana. Modal sosial meliputi kepercayaan, norma timbal balik, jaringan hubungan, solidaritas, dan kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks bencana, unsur-unsur tersebut dapat membantu penyebaran informasi, mobilisasi bantuan, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Penelitian mengenai adaptasi banjir di komunitas pesisir Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga mengandalkan kombinasi hubungan lokal dan hubungan lintas wilayah untuk memperoleh dukungan ketika menghadapi bencana. Oleh karena itu, penguatan modal sosial perlu memperluas jejaring bantuan sekaligus menjaga keberfungsian hubungan sosial lokal (Local and translocal social capital in flood adaptation, 2024).

Modal sosial juga mempunyai dimensi yang perlu dikelola secara kritis. Hubungan kekerabatan yang kuat dapat mempercepat bantuan, tetapi berpotensi menyebabkan distribusi sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu apabila mekanisme penyaluran tidak transparan. Demikian pula, kepercayaan terhadap tokoh lokal dapat memperlancar koordinasi, tetapi tidak boleh menggantikan prinsip akuntabilitas. Pendampingan yang inklusif perlu membangun hubungan antarkelompok, membuka ruang partisipasi bagi warga yang kurang terwakili, dan menyediakan mekanisme pengaduan. Studi mengenai pemulihan pascabencana di Indonesia menunjukkan bahwa modal sosial dapat mendukung pemulihan berbasis komunitas, tetapi juga dapat berkaitan dengan konflik yang menghambat proses pemulihan (Does Social Capital Play an Important Role in Disaster Recovery, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi pendampingan masyarakat terdampak bencana di Aceh perlu dikembangkan melalui pendekatan terpadu yang menghubungkan kolaborasi relawan, edukasi kesiapsiagaan, dan penguatan modal sosial komunitas. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi. Kolaborasi menyediakan koordinasi dan dukungan sumber daya, edukasi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali serta merespons ancaman, sedangkan modal sosial memperkuat kepercayaan dan kerja sama untuk mempertahankan kesiapsiagaan. Pendampingan juga perlu dirancang secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sejak pemetaan kebutuhan hingga evaluasi program.

Permasalahan utama yang menjadi perhatian artikel ini adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara bantuan kemanusiaan yang diberikan, kesiapan masyarakat menghadapi ancaman berikutnya, dan kemampuan komunitas mempertahankan solidaritas setelah masa tanggap darurat berakhir. Kajian mengenai koordinasi relawan, edukasi kesiapsiagaan, dan modal sosial sering kali dibahas sebagai dimensi yang terpisah, padahal pelaksanaannya saling memengaruhi. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kerangka pendampingan terpadu yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh. Urgensi penelitian terletak pada pengembangan program yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat pengetahuan, jejaring sosial, dan kapasitas lokal. Tujuannya adalah merumuskan strategi pendampingan berbasis komunitas yang partisipatif, inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan serta menyediakan indikator untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan orientasi pemecahan masalah. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat terdampak bencana sebagai mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas kegiatan, melaksanakan intervensi, dan mengevaluasi hasil program. Kerangka pelaksanaannya menggabungkan pendampingan sosial, pendidikan kesiapsiagaan, pengorganisasian relawan, serta penguatan jejaring komunitas. Desain kegiatan dapat dikembangkan dalam bentuk siklus yang meliputi pemetaan awal, perencanaan bersama, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut. Penetapan desain perlu disesuaikan dengan tujuan kegiatan,

kondisi lapangan, karakteristik kelompok sasaran, dan sumber daya yang tersedia. Prinsip pemilihan pendekatan berdasarkan kesesuaian antara pertanyaan, tujuan, dan proses penelitian sejalan dengan penjelasan Creswell dan Creswell (2023).

Tahap awal pengabdian adalah identifikasi konteks dan pemetaan kebutuhan masyarakat. Pemetaan dilakukan melalui observasi lingkungan, wawancara dengan warga, diskusi kelompok terarah, dan penelaahan dokumen yang relevan. Informasi yang dikumpulkan meliputi jenis ancaman, pengalaman bencana, akses terhadap informasi peringatan dini, kondisi kelompok rentan, ketersediaan relawan, mekanisme koordinasi, serta sumber daya sosial yang masih berfungsi. Data tersebut digunakan untuk menentukan prioritas pendampingan dan menghindari pelaksanaan program yang tidak sesuai kebutuhan. Apabila kegiatan dilakukan pada masyarakat yang baru mengalami bencana, pengumpulan data harus memperhatikan keselamatan, kondisi psikologis penyintas, persetujuan partisipan, serta kerahasiaan informasi. Pemetaan tidak boleh menunda bantuan darurat yang diperlukan untuk melindungi keselamatan jiwa.

Tahap berikutnya adalah perencanaan partisipatif dengan melibatkan perwakilan masyarakat, perangkat desa atau gampong, relawan, tokoh lokal, tenaga kesehatan, unsur pendidikan, serta lembaga terkait. Pertemuan perencanaan digunakan untuk menyepakati tujuan, pembagian peran, jadwal kegiatan, prosedur komunikasi, sumber daya, dan indikator keberhasilan. Pembagian tugas perlu mempertimbangkan kompetensi dan batas kewenangan masing-masing pihak. Relawan yang bertugas memberikan edukasi, misalnya, perlu menguasai materi dan tidak menyampaikan informasi teknis yang berada di luar kompetensinya. Adapun kegiatan evakuasi dan respons darurat harus mengikuti arahan otoritas berwenang. Perencanaan bersama juga harus menyediakan ruang bagi kelompok yang sering kurang terwakili agar kebutuhan mereka tidak terabaikan.

Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui tiga intervensi yang saling terintegrasi. Intervensi pertama adalah penguatan koordinasi relawan melalui pemetaan kompetensi, penyusunan daftar kontak, pembagian tugas, dan kesepakatan mekanisme pertukaran informasi. Intervensi kedua adalah edukasi kesiapsiagaan melalui penyampaian materi, demonstrasi, simulasi, dan latihan penyusunan rencana darurat keluarga. Intervensi ketiga adalah penguatan modal sosial melalui musyawarah warga, kegiatan gotong royong, pembentukan kelompok siaga, dan pengembangan jejaring kerja sama. Pemilihan bentuk intervensi harus mempertimbangkan ancaman yang dominan, aksesibilitas lokasi, bahasa masyarakat, dan ketersediaan sarana. Pelaksanaan pendidikan kebencanaan dapat menggunakan pendekatan yang fleksibel, tetapi informasi keselamatan harus tetap mengacu pada pedoman resmi dan dapat diverifikasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif yang menggabungkan informasi kualitatif dan indikator kuantitatif sederhana apabila data memungkinkan. Pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan dapat digunakan untuk menilai perubahan pengetahuan peserta mengenai tanda bahaya, jalur evakuasi, nomor kontak darurat, dan tindakan yang harus dilakukan ketika menerima peringatan. Evaluasi proses mencakup partisipasi warga, keterlaksanaan agenda, koordinasi antarrelawan, keterjangkauan kelompok rentan, serta hambatan yang muncul. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui wawancara, diskusi reflektif, dan dokumentasi proses kegiatan. Hasil penilaian kemudian digunakan untuk memperbaiki rancangan program dan menentukan kebutuhan pendampingan lanjutan. Creswell dan Poth (2024) menekankan pentingnya kesesuaian prosedur pengumpulan dan analisis data dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.

Keabsahan informasi diperkuat melalui triangulasi sumber, perbandingan catatan observasi dengan keterangan partisipan, pemeriksaan kembali ringkasan hasil bersama perwakilan masyarakat, serta dokumentasi keputusan kegiatan. Pelaksana perlu membedakan informasi yang berasal dari pengamatan langsung, pernyataan partisipan, dokumen, dan interpretasi tim. Perlindungan etika dilakukan melalui persetujuan partisipasi, penghormatan terhadap hak untuk menolak, penyamaran identitas dalam laporan, serta penyimpanan data secara aman. Dalam kondisi bencana, pengumpulan cerita traumatis tidak boleh dipaksakan dan pelaksana harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk tekanan psikologis penyintas. Proses evaluasi sebaiknya berorientasi pada pembelajaran bersama, bukan pada pencarian kesalahan individu atau komunitas.

Secara operasional, metode ini menghasilkan rancangan pendampingan yang dapat dievaluasi berdasarkan perubahan pengetahuan, keterlibatan masyarakat, kualitas koordinasi relawan, keberfungsian jaringan sosial, dan keberlanjutan kelompok siaga. Namun, karena data lapangan dan catatan pelaksanaan belum tersedia dalam bahan yang diberikan, artikel ini belum dapat menyatakan

besaran peningkatan pengetahuan, jumlah peserta yang berhasil didampingi, atau tingkat efektivitas program secara empiris. Indikator tersebut harus diisi berdasarkan hasil kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Perbedaan antara rancangan program dan hasil terukur penting agar laporan pengabdian tetap transparan, dapat ditelusuri, dan memenuhi standar integritas akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Relawan dan Penguatan Sistem Koordinasi Pendampingan Masyarakat Terdampak Bencana

Kolaborasi relawan merupakan fondasi operasional dalam pendampingan masyarakat terdampak bencana karena kebutuhan penyintas biasanya melibatkan berbagai sektor secara bersamaan. Pada tahap awal, masyarakat dapat membutuhkan makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dukungan psikososial, informasi keselamatan, dan bantuan untuk menghubungkan kembali anggota keluarga. Kebutuhan tersebut tidak selalu dapat dipenuhi oleh satu organisasi. Oleh karena itu, strategi pendampingan perlu mengembangkan pola kerja sama yang menghubungkan relawan lokal, organisasi kemanusiaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat. Kolaborasi yang baik bukan sekadar keberadaan banyak pihak dalam satu kegiatan, melainkan kesepakatan mengenai tujuan, pembagian peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Dalam konteks Aceh, sistem koordinasi perlu mempertimbangkan struktur pemerintahan gampong, jaringan sosial setempat, karakteristik geografis, dan jenis ancaman bencana yang dihadapi.

Tahap pertama optimalisasi kolaborasi adalah membangun peta aktor dan sumber daya. Pemetaan tersebut bertujuan mengetahui siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mempunyai kompetensi teknis, siapa yang menguasai informasi lokal, dan siapa yang dapat menjangkau kelompok rentan. Relawan lokal biasanya mempunyai keunggulan dalam mengenali kondisi lingkungan, bahasa, kebiasaan masyarakat, serta lokasi keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, relawan dari luar daerah dapat membawa tambahan tenaga, keahlian, peralatan, dan jaringan dukungan. Pemerintah memiliki kewenangan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan perguruan tinggi dapat membantu edukasi, dokumentasi, pemetaan, dan evaluasi. Organisasi masyarakat dapat memfasilitasi komunikasi dengan warga dan memperkuat legitimasi program. Pemetaan yang jelas memungkinkan setiap pihak memahami kontribusinya tanpa mengambil alih peran lembaga lain.

Penyusunan struktur koordinasi dapat dimulai dengan membentuk tim pendampingan yang memiliki penanggung jawab, penghubung lapangan, petugas pendataan, fasilitator edukasi, serta petugas pemantauan dan evaluasi. Struktur tersebut tidak harus menjadi organisasi baru yang birokratis. Dalam situasi tanggap darurat, struktur sederhana dengan jalur komunikasi yang jelas sering lebih mudah dijalankan. Tim perlu menyepakati mekanisme pelaporan, waktu pembaruan informasi, prosedur eskalasi masalah, dan cara menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi. Informasi yang dibagikan harus relevan dengan tugas penerima, sedangkan data pribadi penyintas perlu dilindungi. Pendataan sebaiknya menggunakan format yang konsisten agar kebutuhan, bantuan yang sudah diterima, dan kebutuhan lanjutan dapat dibandingkan secara akurat.

Koordinasi juga memerlukan pemahaman tentang kemungkinan terjadinya duplikasi bantuan. Beberapa organisasi mungkin menyalurkan barang yang sama ke lokasi yang mudah dijangkau, sementara masyarakat di lokasi terpencil belum menerima bantuan yang memadai. Situasi tersebut dapat dikurangi dengan pemetaan kebutuhan berbasis wilayah, pencatatan distribusi, dan pembaruan data secara berkala. Akan tetapi, data tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda bantuan yang mendesak. Ketika informasi belum lengkap, tim dapat mengambil keputusan sementara berdasarkan penilaian risiko, kemudian memperbaikinya setelah memperoleh informasi tambahan. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan, tingkat kerentanan, dan keselamatan, bukan berdasarkan kedekatan sosial atau kemudahan akses semata.

Kolaborasi relawan juga membutuhkan standar komunikasi yang dapat dipahami bersama. Pesan tentang lokasi pengungsian, jalur evakuasi, layanan kesehatan, dan peringatan bahaya harus disampaikan secara konsisten. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta, terutama ketika berkaitan dengan potensi tsunami, banjir susulan, atau ancaman lain yang dapat memengaruhi keputusan keselamatan. Setiap tim perlu mengetahui sumber informasi resmi, petugas yang berwenang mengonfirmasi informasi, dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan perubahan situasi. Apabila jaringan internet atau telekomunikasi terganggu, komunikasi alternatif

melalui radio, pengeras suara, pertemuan langsung, atau penghubung lokal dapat dipertimbangkan sesuai kondisi lapangan.

Salah satu bentuk kolaborasi yang relevan adalah pembentukan kelompok relawan berbasis gampong. Kelompok ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana, membantu menyebarkan informasi, mendata kebutuhan, serta memfasilitasi latihan kesiapsiagaan. Kelompok lokal tidak boleh dibebani tanggung jawab yang melampaui kemampuan dan kewenangannya. Mereka membutuhkan pelatihan, pendampingan, akses terhadap informasi, dan dukungan operasional yang memadai. Kegiatan kelompok juga perlu melibatkan perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok rentan. Keberagaman anggota dapat memperluas cakupan informasi dan mencegah dominasi keputusan oleh kelompok yang memiliki pengaruh sosial lebih besar.

Pengalaman penelitian mengenai kesiapsiagaan tsunami di Muara Batu, Aceh, memperkuat relevansi pendekatan berbasis masyarakat dalam mitigasi bencana. Konteks lokal perlu dipertimbangkan dalam perencanaan karena pengetahuan risiko dan kapasitas menghadapi ancaman dapat berbeda antara satu komunitas dan komunitas lainnya. Dengan demikian, kolaborasi relawan sebaiknya tidak menerapkan model seragam untuk semua lokasi, tetapi menyesuaikan bentuk kegiatan dengan kebutuhan dan sumber daya setempat (Utariningsih et al., 2023).

Untuk memastikan kolaborasi menghasilkan manfaat, evaluasi perlu menilai kualitas koordinasi, bukan hanya jumlah relawan atau banyaknya kegiatan. Indikator yang dapat digunakan mencakup kejelasan pembagian tugas, kecepatan penyampaian informasi, keterlacakan distribusi bantuan, keterjangkauan kelompok rentan, penyelesaian pengaduan, dan kemampuan tim menindaklanjuti kebutuhan. Penilaian dapat dilakukan melalui catatan koordinasi, observasi kegiatan, wawancara, dan diskusi reflektif. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki prosedur kerja, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Dengan pendekatan tersebut, kolaborasi menjadi proses pembelajaran kelembagaan yang memperkuat kesiapan komunitas menghadapi kejadian berikutnya.

Secara konseptual, hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah terbentuknya sistem pendampingan yang lebih terarah, transparan, dan saling melengkapi. Akan tetapi, hasil tersebut masih merupakan sasaran program yang perlu diuji melalui pelaksanaan lapangan. Keberhasilan tidak dapat dinyatakan hanya berdasarkan terbentuknya tim atau terselenggaranya rapat koordinasi. Bukti keberhasilan harus mencakup perubahan proses kerja, kualitas layanan, pemerataan bantuan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Edukasi Kesiapsiagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Edukasi kesiapsiagaan perlu ditempatkan sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang menghubungkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tindakan. Penyampaian informasi mengenai bahaya bencana belum tentu menghasilkan kemampuan mengambil keputusan apabila masyarakat tidak pernah mempraktikkan tindakan penyelamatan. Oleh karena itu, program pendampingan sebaiknya memadukan diskusi, demonstrasi, latihan, simulasi, dan evaluasi. Materi pendidikan harus menjelaskan ancaman yang relevan bagi wilayah setempat, sumber informasi resmi, tindakan sebelum bencana, langkah saat peringatan diterima, serta prosedur setelah keadaan darurat. Pendidikan juga harus menjelaskan keterbatasan pengetahuan dan pentingnya mengikuti arahan otoritas yang berwenang.

Bagi masyarakat pesisir Aceh, pendidikan kesiapsiagaan tsunami perlu mencakup pemahaman tentang gempa kuat atau berkepanjangan yang dapat menjadi tanda untuk segera menyelamatkan diri, tanpa menunggu informasi tambahan apabila kondisi tersebut sesuai dengan panduan keselamatan resmi. Masyarakat perlu mengetahui jalur menuju tempat yang lebih tinggi atau lokasi evakuasi yang telah ditetapkan, titik berkumpul, alternatif jalur ketika jalan utama terhalang, dan cara membantu orang yang memerlukan dukungan. Informasi tentang tsunami tidak boleh disamakan dengan prosedur menghadapi semua jenis bencana. Untuk banjir, misalnya, edukasi harus mempertimbangkan kenaikan muka air, arus deras, potensi kontaminasi, akses menuju tempat aman, serta bahaya memasuki bangunan atau jalan yang tergenang.

Pembelajaran partisipatif memungkinkan masyarakat menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Fasilitator dapat meminta peserta menggambarkan rute dari rumah menuju tempat aman, mengidentifikasi lokasi berisiko, dan membahas hambatan yang mungkin muncul ketika evakuasi berlangsung pada malam hari. Kegiatan tersebut dapat mengungkap persoalan yang tidak terlihat melalui penyampaian materi secara satu arah, seperti keterbatasan kendaraan, jalur yang tidak dapat dilalui kursi roda, kurangnya penerangan, atau kebutuhan mendampingi anak. Hasil diskusi

kemudian digunakan untuk memperbaiki rencana evakuasi. Dengan demikian, pendidikan kebencanaan tidak hanya memberikan pengetahuan umum, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan tindakan yang sesuai dengan kondisi lingkungan mereka.

Simulasi merupakan komponen penting untuk menilai apakah pengetahuan dapat diterapkan. Simulasi dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari latihan mengenali peringatan, menentukan titik kumpul, membawa perlengkapan darurat, hingga mempraktikkan evakuasi sesuai jalur yang aman. Pelaksanaan simulasi harus didahului penjelasan tujuan, pengamanan lokasi, dan koordinasi dengan otoritas terkait. Kegiatan tidak boleh menciptakan kepanikan atau menggunakan informasi palsu yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peringatan. Setelah latihan, fasilitator perlu mengadakan evaluasi untuk mengetahui bagian yang berhasil, hambatan yang muncul, dan perubahan yang diperlukan.

Rencana kesiapsiagaan keluarga perlu menjadi bagian dari pendidikan. Setiap keluarga dapat didorong untuk menyepakati cara menghubungi anggota keluarga, lokasi berkumpul, kontak darurat, kebutuhan obat-obatan, serta cara menyimpan dokumen penting. Keluarga yang memiliki anak kecil, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau anggota dengan keterbatasan mobilitas memerlukan pengaturan tambahan. Pendampingan tidak seharusnya menuntut keluarga membeli perlengkapan yang mahal. Fokusnya adalah pada tindakan yang realistis, seperti mengenali rute aman, menjaga dokumen penting tetap terlindungi, mengetahui titik evakuasi, dan menyiapkan kebutuhan esensial sesuai kemampuan.

Edukasi juga perlu memperhatikan aksesibilitas informasi. Materi dapat disampaikan melalui bahasa yang dipahami warga, ilustrasi, papan informasi, audio, pertemuan komunitas, sekolah, dan media digital. Namun, media digital tidak boleh menjadi satu-satunya saluran karena tidak semua warga mempunyai perangkat, koneksi internet, atau kemampuan membaca informasi digital. Informasi keselamatan harus tersedia dalam bentuk alternatif agar dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat literasi yang berbeda. Selain itu, materi perlu diuji pemahamannya, misalnya dengan meminta peserta menjelaskan kembali langkah yang harus dilakukan.

Studi tentang kesiapsiagaan evakuasi di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya memperlihatkan bahwa pengalaman historis dan kesadaran risiko tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan praktis. Implikasi bagi program pendampingan adalah perlunya penilaian yang membedakan antara pengetahuan mengenai bahaya, sikap terhadap risiko, dan keterampilan melakukan evakuasi. Pelatihan perlu diulang secara berkala dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan, infrastruktur, serta komposisi penduduk (Are we prepared for the next one?, 2025).

Untuk menilai efektivitas edukasi, pelaksana dapat menggunakan pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan, observasi simulasi, wawancara peserta, serta penilaian terhadap rencana darurat keluarga. Indikator dapat mencakup kemampuan mengenali tanda bahaya, memilih tindakan keselamatan yang benar, mengidentifikasi jalur evakuasi, mengetahui sumber informasi resmi, dan memahami cara membantu kelompok rentan. Apabila memungkinkan, evaluasi lanjutan dilakukan beberapa waktu setelah kegiatan untuk melihat apakah pengetahuan tetap diingat dan diterapkan. Pengukuran tersebut perlu dilaporkan dengan jumlah peserta, instrumen yang digunakan, metode analisis, dan keterbatasannya.

Pendidikan kesiapsiagaan yang berkelanjutan pada akhirnya perlu diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin komunitas. Kelompok siaga dapat menyelenggarakan pertemuan berkala, memperbarui daftar kontak, memeriksa kondisi jalur evakuasi, dan mengoordinasikan latihan dengan pihak berwenang. Sekolah, tempat ibadah, organisasi pemuda, dan forum warga dapat menjadi ruang pembelajaran yang mudah dijangkau. Integrasi tersebut mengurangi ketergantungan pada kegiatan pelatihan satu kali dan membuka peluang terjadinya pembelajaran lintas generasi.

Penguatan Modal Sosial, Solidaritas, dan Kemandirian Komunitas dalam Pemulihan Pascabencana

Modal sosial dapat dipahami sebagai sumber daya yang muncul dari hubungan antarindividu dan antarkelompok, termasuk kepercayaan, norma timbal balik, jaringan bantuan, dan kemampuan bekerja sama. Dalam konteks bencana, modal sosial dapat mempermudah masyarakat menemukan anggota keluarga, berbagi informasi, membantu tetangga, menyediakan dukungan sementara, dan mengoordinasikan kegiatan pemulihan. Hubungan sosial yang telah terbentuk sebelum bencana dapat menjadi modal awal untuk menggerakkan bantuan secara cepat. Namun, modal sosial tidak selalu tersedia dalam tingkat yang sama bagi seluruh warga. Pendatang, keluarga miskin, penyandang

disabilitas, dan warga yang memiliki jaringan terbatas mungkin mengalami kesulitan memperoleh dukungan.

Penguatan modal sosial dapat dimulai melalui musyawarah dan pemetaan jaringan dukungan. Warga diajak mengidentifikasi kelompok yang dapat membantu penyebaran informasi, tempat yang dapat digunakan untuk pertemuan, keterampilan yang tersedia, dan mekanisme gotong royong yang masih berfungsi. Pemetaan ini tidak bertujuan mengukur nilai sosial seseorang, tetapi memahami bagaimana sumber daya komunitas dapat dimanfaatkan secara adil. Hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan kelompok pendamping keluarga rentan, tim komunikasi warga, kelompok pemuda, atau jaringan dukungan bagi penyintas yang membutuhkan layanan lanjutan.

Kepercayaan menjadi unsur penting dalam pendampingan karena masyarakat perlu merasa aman untuk menyampaikan kebutuhan dan kritik. Kepercayaan dapat dibangun melalui keterbukaan informasi, konsistensi tindakan, kesediaan mendengarkan, dan pemenuhan komitmen. Relawan sebaiknya menjelaskan tujuan kegiatan, jenis bantuan yang tersedia, batas kemampuan tim, serta prosedur pengaduan. Janji bantuan yang belum dapat dipastikan perlu dihindari karena dapat merusak kepercayaan. Demikian pula, informasi mengenai penerima bantuan harus ditangani secara hati-hati agar tidak membuka identitas atau kondisi pribadi yang sensitif.

Solidaritas komunitas juga dapat diperkuat melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pemulihan lingkungan. Gotong royong membersihkan fasilitas umum, memperbaiki ruang pertemuan, memeriksa akses jalan, dan membantu keluarga yang mengalami kesulitan dapat memperkuat hubungan sosial. Namun, kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara aman dan tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah atau tenaga profesional dalam pekerjaan yang berisiko tinggi. Partisipasi warga perlu bersifat sukarela, dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan kemampuan masing-masing.

Modal sosial yang kuat juga perlu terhubung dengan lembaga di luar komunitas. Jaringan internal yang rapat dapat mempercepat bantuan antartetangga, tetapi tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan yang membutuhkan pembiayaan, layanan kesehatan khusus, pemulihan infrastruktur, atau dukungan psikososial profesional. Karena itu, pendampingan perlu membangun hubungan antara warga dan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemanusiaan, fasilitas kesehatan, serta jaringan sosial di luar daerah.

Kajian mengenai adaptasi banjir pada komunitas pesisir di Padang dan Denpasar menunjukkan pentingnya membedakan dukungan dari jaringan lokal dan hubungan lintas wilayah. Rumah tangga yang menghadapi banjir dapat memanfaatkan keduanya untuk mendapatkan bantuan, sehingga penguatan modal sosial perlu mencakup hubungan yang dekat maupun hubungan yang menjembatani komunitas dengan sumber daya eksternal (*Local and translocal social capital in flood adaptation*, 2024).

Dalam konteks Aceh, tempat berkumpul yang diterima secara sosial dapat menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan hubungan komunitas. Interaksi sehari-hari di tempat pertemuan warga, ruang publik, tempat ibadah, atau lokasi sosial lainnya dapat membantu masyarakat bertukar informasi, mengidentifikasi kebutuhan, dan mempertahankan dukungan setelah bantuan darurat berkurang. Penelitian mengenai budaya kedai kopi di Banda Aceh mengidentifikasi peran ruang sosial informal dalam mendukung pertukaran pengetahuan, interaksi sosial, dan kesinambungan kehidupan komunitas setelah tsunami. Temuan tersebut dapat menjadi inspirasi untuk memanfaatkan ruang yang telah dikenal masyarakat sebagai sarana dialog dan pendampingan, selama aksesnya inklusif (Hanafiah et al., 2025).

Penguatan modal sosial harus disertai mekanisme untuk mencegah ketimpangan dan konflik. Ketika bantuan terbatas, perbedaan persepsi tentang siapa yang paling membutuhkan dapat memicu ketegangan. Kelompok yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pengelola bantuan mungkin memperoleh akses lebih besar daripada warga yang tidak memiliki jaringan kuat. Untuk mengurangi risiko tersebut, kriteria bantuan perlu dijelaskan secara terbuka, data penerima diperiksa dengan memperhatikan privasi, dan tersedia mekanisme pengaduan yang dapat digunakan tanpa intimidasi.

Studi mengenai pemulihan pascagempa Cianjur tahun 2022 menunjukkan bahwa modal sosial berperan dalam mendukung pemulihan berbasis komunitas dan bantuan ekonomi, tetapi juga dapat berkaitan dengan konflik yang menghambat pemulihan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa modal sosial perlu dikembangkan bersama tata kelola bantuan yang transparan dan mekanisme penyelesaian konflik (*Does Social Capital Play an Important Role in Disaster Recovery?*, 2025).

Kemandirian komunitas dapat diperkuat dengan menghubungkan kegiatan sosial dengan pemulihan mata pencaharian. Keluarga yang kehilangan sumber penghasilan mungkin membutuhkan akses terhadap informasi usaha, jaringan pemasaran, dukungan administrasi, atau pelatihan

keterampilan. Program pendampingan dapat memfasilitasi komunikasi antara kelompok masyarakat, pemerintah, koperasi, pelaku usaha, dan lembaga pembiayaan yang relevan. Namun, bantuan ekonomi perlu dirancang sesuai kebutuhan dan kapasitas penerima, bukan berdasarkan asumsi bahwa semua keluarga memiliki kemampuan atau kesempatan yang sama.

Evaluasi penguatan modal sosial dapat menggunakan indikator yang berorientasi pada fungsi, bukan sekadar jumlah kelompok yang dibentuk. Indikator tersebut antara lain keterlibatan warga dalam musyawarah, keberadaan saluran komunikasi yang dapat diakses, frekuensi kegiatan bersama, kepercayaan terhadap mekanisme bantuan, keterjangkauan kelompok rentan, dan kemampuan komunitas menghubungkan kebutuhan dengan lembaga terkait. Wawancara dan diskusi kelompok dapat digunakan untuk memahami apakah hubungan sosial benar-benar membantu masyarakat atau justru menciptakan eksklusivitas.

Secara keseluruhan, modal sosial merupakan unsur yang dapat menghubungkan kesiapsiagaan dengan pemulihan. Kepercayaan mempermudah penerimaan informasi, jaringan sosial mendukung mobilisasi sumber daya, dan norma timbal balik membantu menjaga kerja sama. Akan tetapi, keberlanjutan manfaatnya bergantung pada keterbukaan, inklusivitas, dan tata kelola yang adil. Program pendampingan perlu memastikan bahwa masyarakat mempunyai ruang untuk mengambil keputusan, mengawasi penggunaan sumber daya, dan memperbaiki mekanisme kerja sama.

Integrasi Pendampingan Berkelanjutan, Pemantauan, dan Evaluasi Berbasis Komunitas

Pendampingan yang efektif tidak berakhir ketika distribusi bantuan atau pelatihan selesai. Masyarakat membutuhkan mekanisme yang memungkinkan pengetahuan, jaringan relawan, dan kegiatan kesiapsiagaan tetap berfungsi setelah pendamping eksternal meninggalkan lokasi. Oleh karena itu, integrasi pendampingan berkelanjutan perlu dilakukan melalui kelembagaan lokal, penetapan tanggung jawab, penyediaan dokumen operasional sederhana, dan evaluasi berkala. Kelompok siaga, forum warga, organisasi pemuda, dan perangkat gampong dapat menjadi bagian dari mekanisme tersebut.

Langkah awal untuk membangun keberlanjutan adalah menyusun rencana tindak lanjut bersama masyarakat. Rencana tersebut dapat memuat kebutuhan yang belum terselesaikan, agenda edukasi berikutnya, pembaruan peta risiko, pemeriksaan jalur evakuasi, dan kebutuhan penguatan kapasitas relawan. Setiap kegiatan perlu mempunyai penanggung jawab dan waktu peninjauan yang realistis. Rencana yang terlalu kompleks berisiko tidak dilaksanakan, khususnya apabila masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi dan pemulihan tempat tinggal.

Sistem pemantauan perlu dirancang agar dapat digunakan oleh masyarakat tanpa memerlukan perangkat atau keterampilan administrasi yang rumit. Catatan sederhana mengenai kegiatan, peserta, kebutuhan, hambatan, tindak lanjut, dan hasil evaluasi dapat membantu komunitas memantau perkembangan program. Informasi yang bersifat sensitif harus disimpan secara aman dan hanya diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Apabila tersedia sarana digital, pencatatan elektronik dapat digunakan untuk mempermudah pembaruan informasi, tetapi harus disertai prosedur cadangan ketika konektivitas terganggu.

Evaluasi perlu membedakan keluaran, hasil jangka pendek, dan perubahan jangka panjang. Keluaran dapat berupa jumlah sesi edukasi, jumlah relawan yang mengikuti pelatihan, atau tersusunnya rencana darurat. Hasil jangka pendek dapat berupa perubahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, atau perbaikan koordinasi. Perubahan jangka panjang mencakup keberlanjutan kelompok siaga, penggunaan rencana evakuasi dalam kegiatan rutin, perluasan jejaring dukungan, dan kemampuan komunitas mempertahankan kegiatan kesiapsiagaan.

Pemantauan juga harus memperhatikan pengalaman kelompok rentan. Data agregat dapat menyembunyikan ketimpangan apabila tidak menunjukkan siapa yang berhasil dijangkau dan siapa yang masih menghadapi hambatan. Oleh sebab itu, evaluasi perlu memeriksa akses terhadap materi edukasi, keterlibatan dalam musyawarah, akses bantuan, dan kemampuan menggunakan jalur evakuasi. Data dapat dipilah berdasarkan karakteristik yang relevan, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan menghindari pelabelan yang merugikan.

Kualitas komunikasi risiko menjadi salah satu indikator penting keberlanjutan. Masyarakat perlu mengetahui sumber informasi yang dapat dipercaya, cara memverifikasi pesan, dan langkah yang harus diambil ketika informasi saling bertentangan. Kelompok pendamping dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa materi yang digunakan tetap mutakhir. Kanal komunikasi harus mencakup sarana daring dan luring agar warga yang tidak mempunyai akses internet

tidak tertinggal. Penelitian tentang komunikasi bencana berbasis komunitas di Indonesia menyoroti pentingnya hubungan antara media, pendidikan, dan pengetahuan lokal dalam mendukung pemahaman risiko (Rizal et al., 2025).

Keberlanjutan juga memerlukan pembiayaan yang realistis. Kegiatan seperti pembaruan materi, latihan evakuasi, pemeliharaan alat komunikasi, dan pertemuan koordinasi membutuhkan sumber daya. Pendampingan dapat membantu komunitas mengidentifikasi sumber dukungan dari anggaran yang sah, program pemerintah, kemitraan perguruan tinggi, dan organisasi kemanusiaan. Pengelolaan dana perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dan menggunakan prosedur pertanggungjawaban yang jelas.

Penguatan kelembagaan lokal sebaiknya tidak dilakukan dengan membentuk terlalu banyak kelompok yang mempunyai fungsi serupa. Struktur yang tumpang tindih dapat menyebabkan kebingungan, persaingan sumber daya, dan kelelahan relawan. Sebelum membentuk kelompok baru, pendamping perlu menilai apakah organisasi yang sudah ada dapat diperkuat. Kelompok yang telah dipercaya masyarakat mungkin lebih efektif daripada struktur baru yang belum memiliki legitimasi.

Dalam pelaksanaan pengabdian, proses refleksi bersama merupakan cara untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mempunyai kendali atas arah kegiatan. Pertemuan evaluasi dapat membahas perubahan kebutuhan, hambatan pelaksanaan, pengalaman peserta, dan prioritas tindak lanjut. Pendamping perlu menyampaikan temuan secara mudah dipahami dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi interpretasi tim. Hasil evaluasi tidak boleh hanya digunakan untuk menyusun laporan bagi lembaga pemberi dukungan, tetapi juga harus menjadi bahan pengambilan keputusan komunitas.

Keberhasilan model pendampingan terpadu dapat dinilai melalui konsistensi hubungan antara koordinasi relawan, edukasi kesiapsiagaan, dan modal sosial. Koordinasi yang baik memungkinkan informasi edukasi disampaikan secara merata; edukasi membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya; sementara modal sosial menjaga agar kegiatan dapat dilanjutkan melalui kerja sama warga. Jika salah satu komponen tidak berfungsi, manfaat dua komponen lainnya dapat berkurang.

Oleh karena itu, kerangka pendampingan berkelanjutan sebaiknya menempatkan komunitas sebagai pusat pembelajaran, sementara lembaga eksternal berfungsi sebagai fasilitator, penyedia keahlian, dan penghubung sumber daya. Model ini tidak menghilangkan peran pemerintah atau organisasi profesional, melainkan memperjelas hubungan antara kapasitas lokal dan dukungan eksternal. Dalam konteks Aceh, penerapannya perlu mempertimbangkan perbedaan antara wilayah pesisir, perkotaan, pedesaan, dan daerah yang aksesnya terbatas.

Sebagai sintesis, optimalisasi pendampingan masyarakat terdampak bencana perlu diarahkan pada perubahan sistem, bukan hanya peningkatan jumlah aktivitas. Sistem yang baik memiliki koordinasi yang jelas, pendidikan yang dapat diterapkan, jaringan sosial yang inklusif, mekanisme evaluasi yang transparan, dan rencana keberlanjutan yang realistis. Seluruh komponen tersebut harus dikembangkan secara bertahap dan berdasarkan bukti pelaksanaan.

KESIMPULAN

Optimalisasi pendampingan masyarakat terdampak bencana di Aceh memerlukan pendekatan terpadu yang menghubungkan kolaborasi relawan, edukasi kesiapsiagaan, penguatan modal sosial, dan keberlanjutan program berbasis komunitas. Pendampingan tidak cukup dilaksanakan melalui penyaluran bantuan material, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko, mengambil keputusan keselamatan, membangun jejaring dukungan, dan berpartisipasi dalam pemulihan. Kolaborasi relawan menjadi unsur penting untuk meningkatkan koordinasi, memperjelas pembagian tugas, memperluas jangkauan layanan, dan mengurangi duplikasi bantuan. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada komunikasi yang konsisten, pembagian peran yang sesuai kompetensi, perlindungan kelompok rentan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Edukasi kesiapsiagaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pembelajaran partisipatif, demonstrasi, simulasi evakuasi, dan penyusunan rencana darurat keluarga. Materi pendidikan harus disesuaikan dengan jenis ancaman, karakteristik wilayah, dan kebutuhan masyarakat. Penguatan modal sosial dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan, gotong royong, partisipasi warga, dan hubungan antarkelompok serta memperluas jejaring dengan lembaga eksternal. Meskipun demikian, modal sosial perlu dikelola secara inklusif agar hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial tidak menimbulkan ketimpangan dalam akses bantuan. Integrasi ketiga komponen tersebut membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang mengukur perubahan pengetahuan, kualitas koordinasi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan kelembagaan lokal. Karena data pelaksanaan lapangan belum tersedia,

kesimpulan ini merupakan sintesis konseptual dan belum membuktikan efektivitas suatu program pengabdian tertentu. Implementasi yang direkomendasikan adalah pengembangan program pendampingan berbasis gampong melalui pemetaan kebutuhan, pembentukan atau penguatan kelompok relawan, pelatihan kesiapsiagaan, pengembangan jejaring sosial, serta evaluasi partisipatif secara berkala. Program perlu melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan. Dengan pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan, model ini berpotensi memperkuat kemandirian, kesiapsiagaan, dan ketahanan sosial masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/sam/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Gisevius, K., Niesters, L.-M., Larasati, A., & Braun, B. (2026). Local and translocal social capital in flood adaptation: Evidence from Indonesian coastal communities. *Environmental Hazards*, 25(1), 39–59. <https://doi.org/10.1080/17477891.2024.2424310>
- Hanafiah, M. H., Muttaqim, H., Wiyata, & Yulianto, E. (2026). Exploring the role of coffee shop culture in fostering social resilience in post-tsunami Aceh, Indonesia. *Local Environment*, 31(5), 646–663. <https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2519357>
- Hidayati, D., Prasetyo, Y. E., Lassa, J., & Dalimunthe, S. A. (Eds.). (2025). *Examining disaster risk reduction in Indonesia: Building social resilience*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-4182-6>
- Ningtias, Y. R., Noviani, R., Wijayanti, P., & Osza, A. A. (2025). Preparedness through social capital in Bengawan Solo River communities, Surakarta City. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 17(1), Article a1857. <https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1857>
- Nurdin, M. R. (2024). Islamic faith-based organisations and their role in building social capital for post-disaster recovery in Indonesia. *Disasters*, 48(Suppl. 1), Article e12635. <https://doi.org/10.1111/disa.12635>
- Qadriina, H. I., Herdiansyah, H., & Aryo, B. (2024). Does social capital play an important role in disaster recovery? A qualitative study of the 2022 Cianjur earthquake in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 33, 432–451. <https://doi.org/10.25133/JPSSV332025.023>
- Rizal, E., Winoto, Y., Sugito, T., Nugroho, C., & Septian, F. I. (2025). Disaster communication in the digital age: A community-based case study of media, education, and local knowledge in Pangandaran, Indonesia. *Frontiers in Communication*, 10, Article 1632436. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632436>
- Sofyan, H., Rahmatina, G., Hidayati, A., Fisaini, J., Yolanda, Y., Arikawa, T., & Oktari, R. S. (2025). Are we prepared for the next one? Evaluating community evacuation preparedness 20 years after the Indian Ocean tsunami. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 121, Article 105430. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105430>
- Utariningsih, W., Novalia, V., & Saifullah, T. (2023). Mitigation and community preparedness in anticipating tsunami disasters in Muara Batu, Aceh. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 15(1), Article a1542. <https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1542>